



# Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik

Fazza Erwina Dwi<sup>1</sup>, Hafidz Maullana<sup>2</sup>, Hariesty Octari Utami<sup>3</sup>, Hansein Arif Wijaya<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: [hanseinwijaya@unja.ac.id](mailto:hanseinwijaya@unja.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-05-07 Revised: 2024-06-27 Published: 2024-07-03  <b>Keywords:</b> <i>Implementation;</i> <i>Education Policy;</i> <i>Public Policy.</i>	This study aims to determine the implementation of education policy towards public policy. Implementation of education policy and public policy influence each other and are closely related in order to achieve educational goals and the needs of society as a whole. The type of method used in this article is a literature review. The writing of this literature review adopts articles published on various journal provider platforms that discuss the implementation of education policy on public policy. The results show that education policy implementation and public policy are interrelated and have a close relationship. Education policy is one form of public policy produced by the government and public institutions to regulate and advance the education system in order to achieve certain educational goals.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-05-07 Direvisi: 2024-06-27 Dipublikasi: 2024-07-03  <b>Kata kunci:</b> <i>Implementasi;</i> <i>Kebijakan Pendidikan;</i> <i>Kebijakan Publik.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling mempengaruhi dan berhubungan erat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Jenis metode yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur review. Penulisan literatur review ini mengadopsi artikel-artikel yang dimuat pada berbagai platform penyedia jurnal yang membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.

## I. PENDAHULUAN

Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu bagi masyarakat disebut kebijakan publik. Pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan bidang lainnya dapat menjadi bagian dari kebijakan publik. Identifikasi masalah, analisis kebijakan, pengembangan alternatif kebijakan, pemilihan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan adalah bagian dari proses pembuatan kebijakan publik. Pemerintah di tingkat lokal, nasional, atau bahkan internasional dapat membuat kebijakan publik. Mereka juga dapat dibuat oleh lembaga-lembaga publik yang independen, seperti badan pengatur atau lembaga keuangan. Faktor-faktor seperti kepentingan politik, tekanan masyarakat, kondisi ekonomi, dan pengaruh internasional juga dapat memengaruhi kebijakan publik.

Untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan pendidikan di suatu negara atau wilayah, pemerintah atau lembaga pendidikan lainnya mengambil kumpulan kebijakan yang mencakup berbagai hal, seperti kurikulum, metode

pengajaran, pengembangan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, pengawasan dan evaluasi, dan banyak lagi. Kebijakan pendidikan dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan.

Dari perspektif kebijakan pendidikan, ada sejumlah masalah yang muncul, termasuk akses yang tidak memadai ke pendidikan, yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan sektor-sektor kebijakan publik; kualitas pendidikan yang buruk menghambat kemampuan siswa untuk bersaing di pasar kerja, yang berdampak pada produktivitas ekonomi; dan kurangnya dana pemerintah untuk pendidik. Kebijakan publik yang tepat dan terintegrasi diperlukan untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, membiayai pendidikan dengan cukup, dan memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan

kemajuan teknologi dan tuntutan pasar kerja. Dengan cara ini, kebijakan pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif kebijakan publik, ada beberapa masalah. Ini termasuk ketidakkonsistenan dan ketidakberlanjutan kebijakan publik dalam bidang pendidikan, yang dapat membingungkan masyarakat dan menghambat kemajuan pendidikan.

Kurangnya dana untuk membiayai program pendidikan berkualitas tinggi. Tujuan pendidikan dapat terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, masalah birokrasi seperti penganggaran yang lama, kebijakan yang tidak sinkron antara instansi, kurangnya koordinasi antara lembaga dan pihak terkait lainnya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan untuk memastikan program pendidikan yang tepat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, alokasi anggaran yang memadai, konsistensi kebijakan publik, dan partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah dan lembaga publik lainnya dapat menggunakan kebijakan publik untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dengan kebijakan publik yang tepat, pemerintah dan lembaga publik lainnya dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua warga negara. Kebijakan pendidikan memengaruhi kebijakan publik secara keseluruhan, sama halnya dengan kebijakan publik yang memengaruhi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat berdampak positif pada banyak sektor kebijakan publik, termasuk ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dengan memperkuat kebijakan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara kebijakan pendidikan diterapkan terhadap kebijakan publik dan untuk menentukan kebutuhan dan solusi dari masalah yang muncul.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dimana menurut Raihan (2017) penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang ada di perpustakaan untuk kemudian dijadikan sebagai

landasan penelitian. Sumber utama dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, artikel dan artikel internet serta tulisan-tulisan lain yang masih berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik isi. Sedangkan hasil penelitian ini akan disajikan secara deskriptif mengenai analisis kebijakan pendidikan mengenai implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Kebijakan Pendidikan**

#### **1. Pengertian Kebijakan.**

Kebijakan adalah kumpulan tindakan, sikap, rencana, dan keputusan yang dilakukan oleh aktor (pihak terkait) dalam upaya menyelesaikan masalah (Herdiana, 2018). Sebuah kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan terdiri dari dua komponen: pertama, kebijakan adalah reaksi terhadap peristiwa yang terjadi untuk dapat mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama, mengintensifkan kritik terhadap pihak yang memperlakukan kerja sama yang tidak rasional. Yang kedua, kebijakan adalah praktik sosial. Kebijakan tidak hanya tunggal (Iskandar, 2012). Artinya, kebijakan adalah susunan yang dibuat oleh pemerintah, atau pemerintah, sebagai bentuk perumusan yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Proses kehidupan bermasyarakat bukanlah sesuatu yang baru atau unik bagi masyarakat.

Dari pernyataan tersebut, kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan juga sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan.

#### **2. Pengertian Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75). Kebijakan pendidikan (Nugroho, 2008:36) diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem

pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Olsen dan Codd (Nugroho, 2008:36) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Implementasi" berarti "pelaksanaan" atau "penerapan". Istilah ini terkait erat dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut kamus Webster yang dikutip oleh Solichin, "implementasi" adalah istilah ringkas untuk "mengimplementasikan atau mengimplementasikan", yang berarti menyediakan sarana untuk melakukan tindakan dan menimbulkan efek praktis. Berdasarkan definisi di atas, implementasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang dapat mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, perintah atau dekrit presiden, dan keputusan peradilan. (Rusdiana, 2015) pada pelaksanaannya implementasi bukan merupakan hal yang berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik yang masuk pada prosedur rutin yang diberitakan melalui saluran birokrasi akan tetapi implementasi lebih dari hal itu.

Dalam pendidikan, landasan kebijakan berfungsi sebagai pedoman dan garis besar untuk bagaimana siswa melakukan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, landasan tersebut biasanya terkait erat dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku di suatu negara, dan biasanya ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang memiliki kekuasaan saat itu. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan pasti mempunyai dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan pertimbangan kebutuhan masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Agustino, 2008)

## **B. Kriteria Kebijakan Pendidikan**

Salah satu karakteristik khusus kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Memiliki tujuan instruktif: Pendekatan

instruktif harus memiliki tujuan, namun lebih jelas, yang jelas dan terpandu untuk dimasukkan ke dalam pelatihan; (2) Memiliki sudut pandang yang layak: Strategi instruksi yang jelas akan diberi wewenang, jadi penting untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sehingga strategi pelatihan dianggap dan berlaku sah untuk suatu wilayah. Untuk munculnya pendekatan instruktif yang tulus. (3) Memiliki konsep operasional: Sebagai prinsip umum, strategi pelatihan harus mencakup keuntungan operasional yang akan digunakan. Ini adalah komponen penting dalam menjelaskan bagaimana tujuan instruktif akan dicapai. Selain itu, pendekatan instruktif membutuhkan pekerjaan bantuan pilihan. (4) Dibuat oleh para ahli: Untuk menghindari gangguan pelatihan dan lingkungan di luar pengajaran, strategi persekolahan harus diterapkan oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Strategi pembelajaran dibuat oleh eksekutif instruktif, pengawas lembaga pendidikan, dan legislator yang secara langsung diidentifikasi dengan sekolah. (5) Bisa dinilai: Metode instruksi jelas tidak dapat dilepaskan dari kondisi awal untuk dievaluasi. Pengaturan instruktif memiliki karakter yang memungkinkan penilaian yang sederhana dan layak dari mereka, dengan asumsi itu dapat diterima, disimpan, atau dibuat, tetapi jika ada kesalahan, harus diperbaiki. (6) Memiliki sistematika: Strategi sekolah juga merupakan kerangka kerja, jadi setiap aspek yang perlu dikelola harus diatur dengan cara yang logis. Selain itu, kecukupan dan keahlian yang tinggi diperlukan untuk memastikan pengaturan instruktif tidak membumi, tidak adil, dan terutama rumit karena perkembangan variabel yang hilang atau bertabrakan satu sama lain. Pada saat itu, dari jarak jauh, strategi sekolah harus diintegrasikan dengan berbagai strategi, seperti pengaturan politik, pengaturan terkait uang, dan bahkan strategi instruksi yang di atas atau di bawahnya (Ali Imron, 1995: 20).

## **C. Tujuan Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan yang mengatur mengenai Pendidikan sebenarnya sudah sangat banyak, hal ini seharusnya mempermudah perumusan serta ruang gerak bagi para praktisi Pendidikan di Indonesia untuk lebih berinovasi dan memperbaiki system Pendidikan agar sesuai dengan harapan Pendidikan nasional. Banyaknya permintaan pada bab

pembaharuan Pendidikan di Indonesia yang dalam hal ini member pengaruh pada kebijakan Pendidikan yang telah mengalami banyak perubahan dan tentu erat kaitannya dengan tujuan dari implementasi kebijakan yang mengalami banyak perubahan pula.(Hastuti & Soehartono, 2018)

#### D. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu; tujuan yang paling umum adalah mengatur kehidupan bersama (Nugroho 2009). Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang terkait dengan upaya pemerintah untuk menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Nilai-nilai kepublikan terdiri dari berbagai hal, termasuk (1) nilai-nilai yang diinginkan masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, (2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk, (3) memanfaatkan peluang baru untuk kehidupan yang lebih baik, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan meningkatkan ekspor, dan (4) melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan mereka.

Tujuan kebijakan dapat berupa sosial, ekonomi, atau politis. serta undang-undang. Kebijakan publik dibuat dari sudut pandang politik. Untuk menyebarkan dan memberikan nilai dalam bentuk barang dan jasa kepada seluruh masyarakat.

#### E. Aspek-aspek dalam kebijakan

Menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman (2009: 120):

1. Pendekatan instruktif adalah komponen penting dari naluri manusia sebagai individu dalam lingkungan manusia. Penataan instruktif adalah definisi visi dan misi sekolah dalam budaya tertentu.
2. Pengaturan instruktif dibawa ke dunia oleh studi sekolah sebagai ilmu logis, terutama hubungan antara hipotesis dan praktik instruktif. Investigasi strategi, rencana strategi, pelaksanaan, dan penilaian berkorelasi dalam strategi pelatihan.
3. Metode pembelajaran harus memiliki legitimasi dalam peningkatan siswa dan masyarakat yang mengikutinya. Di sisi lain, legitimasi metode instruktif terletak pada komitmennya terhadap siklus kebebasan

individu dalam memperbaiki diri mereka sendiri.

4. Transparansi: Menerima Dalam pergaulan yang bersahabat, terjadi siklus instruktif yang mirip dengan siklus welas asih. Ini menunjukkan bahwa sekolah berhubungan dengan lingkungannya. Dalam kasus di mana pembelajaran berkolaborasi dengan daerah setempat, suara daerah harus dipertimbangkan di berbagai tingkatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian strategi sekolah.
5. Karya kreatif mendukung pengaturan instruktif. Meskipun tidak eksklusif, pendekatan instruktif dapat diterapkan. Keputusan tentang berbagai pilihan pengaturan adalah bagian dari strategi instruksi, jadi penting untuk melihat hasilnya secara praktis.
6. Studi strategi memerlukan evaluasi. Ini termasuk berbagai strategi terbuka, pengaturan penjaga publik, dan strategi moneter. Untuk memenuhi kebutuhan siswa, pendekatan pembelajaran harus difokuskan pada kebutuhan siswa. Strategi pembelajaran harus ditujukan untuk membangun individu terpelajar alami yang menjadi spesialis perubahan di masyarakat umum negara mereka.
7. Strategi pembelajaran harus berfokus pada kebutuhan siswa pada awalnya, dan pendekatan instruksional harus berfokus pada menciptakan individu terpelajar alami yang menjadi spesialis perubahan di masyarakat umum negara mereka.
8. Strategi pembelajaran harus ditujukan untuk membangun masyarakat mayoritas. Understudies akan tetap sendiri dan membangun karakternya sebagai individu kreatif yang membantu dan menyenangkan dalam mengubah masyarakat secara keseluruhan. Strategi pengajaran harus melibatkan diskusi dan komunikasi siswa dengan guru, masyarakat mereka, negara mereka, dan akhirnya dengan orang-orang di seluruh dunia.
9. Penjabaran misi pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai pendekatan instruktif. Misi sekolah lebih berpusat pada pencapaian tujuan instruktif yang konkret ketika visi pengajaran menggabungkan rencana teoritis. Strategi pengajaran adalah sesuatu yang unik yang terus berubah tetapi jelas terstruktur.

10. Metode pengajaran harus didasarkan pada kemampuan. Strategi instruktif harus diterapkan di depan publik, bukan hanya ditulis dalam kata-kata. Strategi pendidikan yang menyeluruh adalah pendekatan pengajaran yang mempertimbangkan kemampuan lapangan. Oleh karena itu, strategi pelatihan yang efektif harus mempertimbangkan kapasitas karyawan, aksesibilitas aset, pelaksanaan yang stabil, dan penegakkan kemampuan kerja yang inovatif.
11. Kebutuhan siswa menentukan strategi pembelajaran. Kekuatan telah terbukti terkait erat dengan pelatihan. Ketahuilah bahwa kekuatan harus berkumpul untuk membantu meningkatkan kebebasan siswa daripada mengontrol mereka. Sekolah memiliki kekuatan dalam hal mayoritas masyarakat bukan untuk mengontrol siswa; sebaliknya, mereka dapat bekerja untuk membangun siswa menjadi warga negara yang kreatif dan bermanfaat.
12. Pendekatan instruktif tidak bergantung pada kecerdasan. Pengaturan instruktif adalah hasil dari pertimbangan yang bijaksana terhadap berbagai pilihan dengan menetapkan pilihan yang dianggap paling efektif dan menarik dengan mempertimbangkan berbagai jenis bahaya dan reaksi terhadap pilihan tersebut. Meskipun strategi sekolah alamiah memiliki jalan yang benar, ia akan menjadi tidak efektif jika tidak digunakan dengan benar. Selain itu, kreativitas tidak perlu mendukung strategi yang alami. Strategi sekolah naluriah akan menjadi mubazir jika ditegakkan dalam jangka waktu tertentu. Siswa akan diuji dengan strategi naluriah.

Kebijakan pendidikan yang tepat akan dihasilkan dari kejelasan tujuan. Siswa tidak akan tertarik pada strategi pembelajaran dengan kursus yang tidak jelas. Interaksi instruktif, seperti yang telah dijelaskan, adalah siklus yang memperhatikan peluang siswa. Siswa bukanlah subjek pembelajaran. Semua pendekatan instruktif berpusat pada kepentingan siswa atau kebebasan mereka (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 141-153).

#### F. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kata "execution" berasal dari referensi Word Webster, yang berarti "melaksanakan", yang berarti bermaksud untuk melakukan sesuatu. Dengan cara yang sama, tidak seperti

tahap rencana masalah atau definisi strategi sebagai tahap hipotetis, tahap pragmatis adalah eksekusi strategi (Muhammad Jumhadi dan Wa Rijo, 2008). Para ahli dapat berdebat tentang definisi pelaksanaan strategi. Salah satu dari mereka adalah Anderson (2006), yang berpendapat bahwa pelaksanaan pengaturan adalah penerapan tindakan pemerintah untuk masalah tersebut.

Menurut Solichin Mujianto (2015: 151), eksekusi strategi adalah proses yang panjang yang menyelidiki cara strategi entertainer memilih strategi. Di mana kegiatan mitra secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan strategi. Dalam hal yang sama, dijelaskan bahwa pelaksanaan pengaturan adalah cara yang diselesaikan sehingga strategi otoritatif dapat mencapai tujuan dan tujuan yang dinyatakan. Ini dapat dicapai dengan melaksanakannya sebagai program tindakan secara langsung atau dengan menggunakan pendekatan anak perincian (induksi) dari pendekatan aktual sebagai ilustrasi pengaturan atau yang sering disebut sebagai pedoman. tindakan (Riant Nugroho, 2009).

Pandangan berbeda tentang eksekusi strategi termasuk: 1) pendekatan yang dikagumi; pembuat strategi memulai desain kerjasama dengan tujuan untuk menghidupkan pertemuan tujuan untuk dilaksanakan; dan 2) pertemuan target; produsen strategi menggunakan mitra strategi, bagian dari pengaturan pertemuan terkait, untuk memberikan contoh komunikasi. Karena pertemuan ini adalah tujuan dari pelaksanaan strategi, diyakini bahwa contoh perilaku akan diubah sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pendekatan organisasi pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan dan faktor alam. Faktor-faktor dalam iklim umum juga mempengaruhi pelaksanaan strategi, seperti aspek dari kebiasaan sosial, realitas sosial, ketergantungan keuangan, dan politik (Smith 1973; Islamy, 2003; Riadi, 2018).

Pelaksanaan strategi pelatihan adalah proses mengatasi masalah instruktif untuk menentukan tujuan strategi melalui siklus, atau sistem penyampaian, yang sesuai dengan metode strategi dan hasil yang dapat diterima oleh semua mitra sekolah, meningkatkan konsistensi dan permintaan otoritatif. Setelah suatu pendekatan dirinci, pergerakan penting berikutnya adalah pelaksanaan pengaturan

instruksi. Tanpa eksekusi, strategi instruksi yang telah dirinci akan menjadi tidak relevan atau berlebihan. Dengan demikian, pelaksanaan strategi persekolahan sangat penting (penting) dalam pendekatan terbuka (Iwan Satibi, 2010; 25).

Program kegiatan yang direncanakan dan dibiayai dibentuk untuk mencapai tujuan pelaksanaan strategi. Program ini berjalan sesuai jadwal. Untuk mencapai tujuan, penting untuk fokus pada substansi strategi dan pengaturan pelaksanaan saat menerapkan pengaturan instruktif. oleh Nakamura dan Smallwood pada tahun 1980.

Kepentingan yang dipengaruhi oleh pengaturan (dipengaruhi premium), berbagai jenis keuntungan yang akan diciptakan (jenis keuntungan), tingkat kemajuan yang diinginkan (perluasan iklim kemajuan), posisi produsen strategi (situs dinamika), pelaksana program yang harus didukung oleh pelaksana yang cakap (praktisi program), dan aset yang dapat dikumpulkan untuk menerapkan strategi atau aset yang diajukan (Merilee). Pengaturan eksekusi untuk sementara terdiri dari: 1) kekuatan, minat, dan prosedur penghibur yang bersangkutan (termasuk kekuatan dan sistem penghibur), 2) kualitas organisasi dan sistem yang berkuasa sebagai iklim untuk melaksanakan pengaturan yang akan dilaksanakan (sistem kelembagaan karakteristik), dan 3) tingkat konsistensi dan reaksi pelaksana karena pelaksanaan strategi (konsistensi dan responsivitas) (Muchlisin Riadi, 2016).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Kebijakan adalah kumpulan tindakan, sikap, rencana, dan keputusan dilakukan oleh aktor dalam menyelesaikan masalah. Terdiri dari dua komponen: kebijakan adalah reaksi terhadap peristiwa, kebijakan adalah praktik sosial, dan kebijakan adalah susunan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan dapat membantu orang lain mencapai tujuan tertentu dan memecahkan masalah. Eksekusi adalah proses implementasi strategi, yang berbeda dari tujuan atau definisi strategi sebagai hipotesis. Eksekusi strategis adalah proses yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Ini melibatkan berbagai langkah seperti perencanaan, mengembangkan strategi, menetapkan tujuan, dan menghasilkan strategi. Efisiensi eksekusi strategis tergantung pada berbagai faktor seperti

struktur organisasi, faktor sosial-ekonomi, dan faktor politik. Strategi training adalah proses sistematis untuk menentukan kesuksesan strategi melalui pendekatan sistematis, meningkatkan konsistensi dan otoritisme. Efektivitas pelatihan tergantung pada substansi strategi dan implementasi instruksi. Efektivitas pelatihan tergantung pada faktor-faktor seperti sumber daya, sistem manajemen, kualitas organisasi, dan konsistensi dan respons terhadap strategi.

##### B. Saran

Dalam penelitian ini, pembahasan tentang penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan. Penulis harus melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang topik ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alfirzan, A., Nasri, Y., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1521-1529.
- Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta).
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921-1928.
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34-44.
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1), 34-41.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*, 323.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal*

- Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13-26.
- Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 1-10.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Prastiko, M. N., & Supriyanto, A. (2020). Analisis kebijakan publik dan kebijakan pendidikan. In *Seminar Nasional Arah Manajemen Sekolah Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19*.
- Raihan. (2017). *Research methodology*. Jakarta: Jakarta Islamic University.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan.pdf* (pp. 1-263).
- Setiawan, F., Saputra, R., Yuliatin, A. T., & Ilham, M. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 4(2), 362-365.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sudarwan. 2010. *Pengantar Kependidikan*. (Bandung: Alfabeta).
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Sutapa, M. (2008). Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 2, 112408.
- Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545-551.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.